KOMUNITAS TAREKAT DAN POLITIK LOKAL DI ERA ORDE BARU

Penelitian di Kudus, Jawa Tengah

Oleh: Sunyoto Usman'

Pengantar

Intervensi negara pada masa Orde Baru merasuki hampir semua relung kehidupan, termasuk didalamnya kehidupan komunitas keagamaan. Begitu kuatnya posisi negara sehingga intervensi yang dipraktekkan bukan hanya mempengaruhi sikap politik komunitas keagamaan tertentu, melainkan juga menyentuh substansi ajaran yang menjadi basis sosial komunitas tersebut.

Tulisan ini memfokuskan kajian pada komunitas tarekat, salah satu dari komunitas keagamaan yang mengalami pengaruh langsung intervensi negara tersebut. Bahan tulisan ini merupakan bagian laporan penelitian tentang dinamika pandangan politik komunitas tarekat dalam pergulatannya beradaptasi dengan intervensi negara pada era Orde Baru, yang mengambil lokasi penelitian di Kudus, Jawa Tengah.

Tarekat, Mursyid, dan Ajaran Taqlid

Tarekat merepresentasikan sebuah komunitas yang mengembangkan orientasi keagamaannya dalam corak sufistik, tidak terlalu kental dengan suasana figh atau ketentuan yang lebih formal. Keberadaan dan perkembangan komunitas tarekat berkait erat dengan awal mula perkembangan agama Islam di Jawa yang sarat diwarnai oleh corak sufistik atau penuh warna mistik. Di samping itu, tumbuhnya tarekat juga dikarenakan Islam sendiri yang sebenarnya

* Staf pengajar pada jurusan Sosiologi, Fisipol, Universitas Gadjah Mada

memberi landasan yang kuat bagi berkembangnya orientasi sufistik, yaitu ketika kehadirannya diawali oleh proses rohani Nabi Muhammad ber-khalwat dan ber-tannuts di Gua Hira. Orientasi yang lebih syar'i atau lebih sunni di sini sebenarnya baru terbentuk setelah sebagian dari elit agama menunaikan ibadah haji dan menimba ilmu ke Mekkah.

Ketika penetrasi modernisasi semakin deras, sebagian umat Islam merasakan kehilangan ruh keagamaan yang memberikan kedalaman moral-spiritual. Islam yang dibingkai oleh aturan figh, mereka rasakan hanya mampu memenuhi sisi pengalaman eksoterik, dan kurang memadai bagi upaya menyiram kegersangan rohani. Karena itu banyak orang dari berbagai latar belakang sosial kemudian menjadi bagian dari komunitas tarekat. Bersamaan dengan itu di kalangan komunitas tarekat terjadi upaya merumuskan kembali ajaran sufi, terutama dimaksudkan agar pemahaman keagamaan mereka tetap menapak pada jalan yang benar atau tidak bertentangan dengan syari'ah. Untuk kepentingan ini, mereka kemudian membangun institusi yang mensahkan apakah suatu tarekat dapat dinyatakan layak, syah (mu'tabarah) atau tidak. ²

Praktek intervensi negara pada masa Orde Baru menyentuh pula pada basis sosial komunitas tarekat. Dengan dalih legitimasi modernisasi, negara tidak hanya melakukan intervensi pada pilihan-pilihan politik dan sikap partisan para elit agama, melainkan juga menyentuh sendi-sendi dasar komunitas keagamaan. Intervensi negara semasa Orbe Baru ini ditengarai memiliki implikasi yang cukup kuat terhadap ajaran taqlid, ajaran yang menjadi sendi interaksi antara guru dengan murid, yang diekspresikan pada keharusan murid untuk ber-taqlid atau patuh kepada guru. Sebagai akibat dari intervensi negara, pandangan politik komunitas tarekat terbelah menjadi dua. Di satu pihak diketemukan komunitas tarekat yang taqlid penuh kepada guru, baik dalam urusan agama maupun urusan politik, termasuk ariliasinya pada partai politik. Di lain pihak, ada komunitas tarekat yang menangkap kepemimpinan kiyai hanya dalam urusan yang berkaitan dengan agama saja dan tidak dalam urusan politik. Bagi kalangan ini, pandangan politik guru tidak harus menjadi referensi pemikiran politik murid. Mengapa pandangan politik komunitas

Abdurrahman, Moeslim, 'Kesyahduan Sufi dalam Transformasi Sosial, Suatu Pengamatan Perkembangan Tarekat' dalam Pesantren, No.3 Vol. II, P3M Jakarra, hlm. 49

² Bruinessen, Martin van, Tarekat Naqsyabandıyah di Indonesia, Mizan, Bandung, 1992

tarekat terbelah dua semacam itu. Bagaimana proses terbelahnya pandangan tersebut dan faktor-faktor sosial apa saja yang determinan menentukannya?

Fenomena tersebut secara sosiologis menarik dikaji, bukan hanya karena berkaitan dengan telah bergesernya pemahaman doktrin taqlid di kalangan komunitas tarekat, tetapi juga memiliki implikasi yang signifikan terhadap penlalai politik mereka. Penafsiran baru ajaran taqlid dalam tata hubungan guru-murid tarekat telah dirintis melalui kajian Wahid dan Dhofier di Jombang, Jawa Timur pada awal tahun 1980-an³. Dalam kajian tersebut antara lain ditunjukkan bahwa dalam hal berpartai politik, pilihan mursyid ternyata bisa berbeda dengan pilihan murid, dan sebaliknya pilihan murid tarekat tidak selamanya atas restu gurunya. Usaha serupa perlu diperluas di wilayah lain pada komunitas tarekat yang berbeda.

Obyek kajian yang dibahas dalam penelitian ini adalah tarekat *Qadiriyah* wa Naqsyabandiyah dan tarekat Naqsabandiyah Kholidiyah. Kedua jenis komunitas tarekat tersebut terletak di kabupaten Kudus, sebuah daerah yang menggambarkan besarnya komitmen dan peran yang dimainkan oleh para guru/mursyid dalam kancah percaturan politik di tingkat regional. Pandangan politik mereka juga cukup beragam. Sebagian guru memberi dukungan pada Partai Persatuan Pembangunan, dan sebagian yang lain ketika itu menjadi pendukung setia Golongan Karya.

Pada penelitian ini, telah diwawancarai 15 elit tarekat (mursyid, badal, atau kalifah) dan 50 orang murid tarekat. Data yang digali antara lain mencakup (1) pandangan para mursyid, badal dan kalifah tarekat tentang umara; (2) hubungan sosial yang terjalin antara elit tarekat dan elit birokrat lokal; (3) ragam dukungan atau pilihan partai politik di kalangan komunitas; serta (4) derajat taqlid murid terhadap mursyid dalam hal yang berkaitan dengan masalah politik.

Kerja lapangan diawali dengan melakukan observasi langsung terhadap pelbagai kegiatan dua komunitas tarekat tersebut. Hasil observasi dipergunakan untuk merumuskan konsep dan menyusun pelbagi indikator tentang bergesernya pemahaman doktrin taqlid di kalangan komunitas tarekat, terutama yang berkaitan dengan masalah politik. Dalam penelitian ini juga dilakukan wawancara mendalam dengan mursyid, badal dan kalifah tarekat

di seputar persepsi mereka tentang keberadaan dan kualitas para birokrat lokal. Kemudian dilakukan survai dengan instrumen kuesioner yang disusun berdasaarkan kerja lapangan tersebut. Analisis data di samping dilakukan dengan logika verbal, juga melalui analisis taksonomis dalam bentuk matriks atau tabel silang.

Komunitas Tarekat di Kudus

Kudus terletak di pesisir utara Jawa, kira-kira 60 km di sebelah timur kota Semarang. Dalam perbincangan perkembangan Islam di Jawa, Kudus memperoleh tempat khusus karena dari daerah inilah seorang ulama besar bernama Ja'far Sodiq (yang kemudian dikenal dengan Sunan Kudus) menegakkan syiar Islam. Sebagai salah satu pusat pengembangan Islam, di sana diketemukan beberapa peninggalan. Salah satu di antaranya adalah sebuah masjid tua yang dikenal dengan sebutan masjid Menoro. Sunan Kudus dimakamkan di bagian belakang masjid ini, dan menjadi tempat ziarah yang dikunjungi umat dari berbagai daerah.

Berdasarkan catatan yang diperoleh (1994) jumlah penduduk Kabupaten Kudus sebanyak 620.725 jiwa, terdiri dari 303.560 laki-laki serta 317.165 wanita, terhimpun dalam 135.030 kepala keluarga dan tersebar di sembilan kecamatan. Anggota masyarakat daerah ini mayoritas beragama Islam, dan sebagian besar tergolong kategori sangat taat menjalankan syariat. Perkembangan perolehan suara pada Pemilu tahun 1982, 1987 dan 1992 di kabupaten Kudus memperlihatkan dinamika yang menarik. Golongan Karya (Golkar) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengalami pasang-surut, sedangkan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) lamban-laun mengalami kenaikan yang cukup berarti. PDI yang pada pemilu 1987 memperoleh 17.184 suara, naik menjadi 57.223 suara pada pemilu 1992. Sebaliknya, perolehan suara PPP mengalami pasang-surut. Hal ini berkait dengan sikap politik NU yang didasarkan atas hasil keputusan Mukramar Nahdlatul Ulama untuk kembali ke khitah 1926. Perolehan suara PPP pada pemilu 1987 mengalami penurunan, meskipun kemudian kembali naik pada pernilu tahun 1992.

Di Kudus terdapat beberapa kelompok perguruan tarekat yang yang masing-masing memiliki guru atau mursyid sendiri-sendiri. Kelompok perguruan tarekat tersebut adalah tarekat Naqsabandiyah-Khalidiyah, Qadiriyah wa Naqsyabandiyah dan Sadzaliyah. Perguruan tarekat Qadiriyah wa

³ Wahid, Abdurrahman, Muslim di Tengah Pergumulao, Lembaga Penunjang Pembangunan Nasional, Jakarta

Naqsyabandiyah berpusat di desa Piji, kecamatan Dawe dan berdiri tahun 1970. Perguruan tarekat Naqsyabandiyah-Khalidiyah berpusat di dua tempat yaitu di desa Kwanaran (kecamatan Kudus Kota) dan di desa Undaan (Kudus bagian timur), sedangkan tarekat Sadzaliyah, sebenarnya berpusat di Pekalongan. Tarekat ini lebih banyak diminati oleh kalangan muda usia dan para pedagang.

Dari segi keagamaan, perbedaan di antara kelompok-kelompok tarekat tersebut adalah pada praktek dzikir dan urut-urutan sanad dari guru terakhir hingga sumber utama Nabi Muhammad dan Allah. Dalam dunia tarekat dikenal dua sebutan yaitu: (1) tarekat mu'tabaroh atau tarekat yang disepakati keabsahannya dari segi agama oleh para ulama, dan (2) tarekat ghoiru mu'tabarah atau tarekat yang tidak disepakati keabsahannya oleh para ulama karena amalan-amalan tidak sesuai dengan syari'ah Islam dan diragukan urut-urutan sanad-nya hingga Nabi Muhammad dan Allah.

Berkenaan dengan perkembangan tarekat yang cukup majemuk tersebut, Nahdlatul Ulama kemudian merasa perlu untuk organisasi tersendiri yang menghimpun tarekat-tarekat yang hidup di bawah bimbingannya, seperti misalnya Jam'iyyah Al-Tariqah Al-Mu'Tabarah Al-Nahdliyyah.

Dalam tradisi tarekat *Qadiriyah wa Naqsyabandiyah* setiap murid diwajibkan kumpul ber-khalwat setahun tiga kali (masing-masing selama 10 hari) yaitu dari tanggal 1 sampai 10 bulan Muharram, bulan Rajab dan bulan Ramadhan. Mereka juga diwajibkan mengikuti pengajian atau pengajaran tarekat seminggu sekali. Oleh karena bagi sebagian murid ketentuan itu dirasakan terlalu berat, maka mursyid tarekat tersebut kewajiban itu disederhanakan. Setiap murid tarekat diwajibkan ber-khalwat selama 10 hari hanya di awal bulan Ramadhan saja dan kegiatan lainnya diganti dengan wajib berkumpul seminggu sekali.

Tarekat Naqsyabandiyah-Khalidiyah Undaan sebenarnya sudah berdiri sebelum tarekat Naqsyabandiyah-Khalidiyah Kwanaran. Kegiatan keagamaan tarekat Naqsyabandiyah-Khalidiyah Kwanaran hampir sama dengan Qadiriyah wa Naqsyabandiyah yang ada di daerah Piji. Hanya saja di perguruan ini aktivitas diterapkan secara penuh, yaitu setiap murid tarekat diharuskan ber-khalwattiga kali setahun masing-masing 10 hari, yaitu tanggal 1 sampai 10 bulan Ramadhan, bulan Muharram dan bulan Rajab. Sementara untuk pengajaran tarekat diadakan setiap hari Kamis. Mengingat besarnya jumlah murid dan tersebar di banyak daerah yang cukup jauh, tarekat ini

membentuk semacam perkumpulan pengajian tarekat di beberapa daerah di Kudus. Hai ini juga dimaksudkan untuk melayani para murid tarekat yang sudah lanjut usia dan tidak memiliki biaya untuk datang di Kwanaran. Sedangkan kegiatan keagamaan tarekat Naqsyabandiyah-Khalidiyah di Undaan serupa dengan tarekat Naqsyabandiyah-Khalidiyah Kwanaran dilihat dari segi amalannya. Di samping itu, mereka juga menerapkan jadwal khalwat tiga kali setahun secara penuh dan ditambah dengan pengajaran tarekat setiap Selasa.

Tidak seperti dua perguruan tarekat sebelumnya, tarekat Sadzaliyah tidak memiliki waktu resmi untuk amalan secara kolektif. Amalannya lebih bersifat individual dan setiap murid diberi amalan wirid tertentu memurut kemampuannya. Oleh karena itu dalam tarekat ini masing masing murid bisa memiliki bentuk amalan yang berbeda. Amalan itu bisa meningkat setiap saat. Sistim pengajaran tarekat ini dilakukan secara individual, sedangkan sistim pengajaran tarekat mi dilakukan secara individual, sedangkan sistim pengajaran tarekat Naqsyabandiyah-Khalidiyah dan Qadiriyah wa Naqsyabandiyah dilakukan secara kolektif.

Guru Tarekat dan Politik

Seperi telah diungkapkan di depan bahwa penelitian ini telah mewawancarai 15 orang elit, termasuk di dalamnya mursyid, khalifah dan badai dari tiga perguruan farekat fersebut. Ketika kepada para responderi ditanyakan bagaimana pandangan mereka tentang umara, hampir semuanya menyatakan bahwa umara adalah penerima amanah yang dalam menjalankan pekerjaannya bereferensi pada syari at Islam atau sesuai dengan prinsip-prinsip ahlussunnah wal jamaah. Umara yang paling ideal adalah seperti pada zaman Nabi Muhammad dan empat khulafaur rasyidin. Pada saai itu seluruh keputusan pemerintah mengacu kepada ajaran Islam dan seluruh keputusan tersebut sekaligus sebagai tealisasi syari ah Islam itu sendiri.

Penelitian ini memang tidak memperoleh keterangan yang jelas di sekitar persepsi para guru tarekat tentang apakan aparat pemerintah yang sekarang termasuk dalam konsep umara seperti yang mereka bayangkan. Hanya terlintas kesan bahwa pandangan para guru tarekat tersebut terbelah dua. Kalangan pertama menyatakan pemerintah sekarang kurang begitu dekat dengan konsep tersebut. Beberapa hal yang menjadi kritik tajam dari para guru tarekat tersebut

terhadap kebijaksanaan pemerintah adalah masih adanya praktek korupsi, pelaksanaan hukum yang sewenang-wenang, masih diijinkannya prostitusi dan perjudian, kurang dilibatkannya ulama dalam pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan publik, serta kecenderungan pemerintah untuk mencampuri masalah ibadah keagamaan murni seperti penentuan hari raya Idul Fitri. Menurut mereka, sikap dan perilaku sebagian besar pejabat pemerintah lokal masih belum mementingkan kepentingan rakyat sesuai dengan sumpah jabatan yang pernah mereka ikrarkan. Pejabat pemerintah lokal menurut mereka bisa dinilai dari sisi yaitu: sikap dan perilaku pejabatnya (sebagai aktor) dan pelbagi kebijaksanaan yang dihasilkannya. Kedua hal termasuk dalam katagori yang tidak harus ditaati kecuali jika menapak di jalan yang diridhai Allah, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis bahwa tidak wajib taat kepada mahluk yang maksiat kepada Allah.

Sementara itu, hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa kalangan kedua agak lebih positif menilai keberadaan pemerintah. Menurut mereka sikap dan perilaku pejabat pemerintah serta pelbagai kebijaksanaan yang dihasilkan memang masih belum utuh mencerminkan ciri dan sifat yang pernah diteladankan oleh para umara Islam. Tetapi menurut mereka para pejabat pemerintah tersebut secara umum memiliki komitmen membangun moral, khususnya yang terkait dengan upaya peningkatan iman dan taqwa. Kegiatan pengajian di daerah ini nampak semarak, meskipun boleh jadi sebagian yang datang dan mengikuti pengajian karena ada kepentingan, atau karena rasa enggan dengan atasannya. Satu hal yang positif adalah ada upaya untuk meningkatkan keimanan, ketaqwaan dan pendidikan moral segenap anggota masyarakat. Kendatipun demikian, mereka pada umumnya sepakat bahwa selama pemerintah tidak menganjurkan masyarakat untuk berbuat maksiat, dan tidak melarang umat Islam menjalankan syariat-syariatnya, maka pemerintah harus didukung. Tetapi jika pemerintah menyerukan kepada masyarakat untuk melanggar syariat Islam, maka pemerintah wajib ditentang.

Dua pandangan tersebut memiliki implikasi pada hubungan mereka dengan pejabat pemerintah lokal. Kalangan pertama pada umumnya kurang begitu akrab dengan aparat pemerintah, meskipun bukan berarti ada permusuhan. Mereka masih menjalin kontak dengan aparat pemerintah, bahkan masih merasa perlu memberi nasehat agar segala bentuk kebijaksanaan pemerintah lokal yang diambil dapat mendatangkan manfaat bagi umat. Dalam benak mereka aparat pemerintah lokal seharusnya lebih mau mengerti dan

memahami kehendak kiyai atau ulama. Sementara itu kalangan kedua kebanyakan menyatakan bahwa hubungan antara mereka dengan pejabat pemerintah lokal dalam beberapa tahun terakhir ini semakin baik. Ada di antara mereka yang menjadi penasehat spiritual pejabat pemerintah lokal. Jalinan hubungan di antara mereka telah melahirkan pelbagai kerjasama, termasuk dalam proses pengambilan keputusan politik yang tergolong krusial. Salah sanı contoh kerjasama itu adalah keberhasilan kiyai meyakinkan pemerintah lokal untuk mengangkat seorang camat di Kudus yang benarbenar memiliki komitmen kuat bagi pengembangan syariat Islam.

Hal penting yang layak dicatat dari hasil penelitian tersebut adalah para guru tarekat kelihatannya memelihara apa yang lazim disebut dengan collectivist culture atau budaya politik yang mengedepankan kebersamaan atau konsensus, dengan ditandai oleh sikap dan perilaku yang cukup loyal kepada pemerintah lokal. Dalam budaya politik semacam ini orang berusaha keras menghindari kemungkinan terjadi konflik, menjauhi disagreement, dan senantiasa berusaha memelihara harmoni. Itulah sebabnya meskipun sebagian besar dari para ulama atau guru tarekat (mursyid, badal dan kalifah) sebenarnya kurang bisa menerima pelbagai kebijaksanaan aparat pemerintah lokal, namun jarang sekali muncul ke permukaan menjadi isu publik. Perbedaan-perbedaan pandangan dan keinginan di antara mereka diusahakan diredam sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan gejolak politik. Pertanyaannya kemudian adalah mengapa collective culture lebih terlihat dibandingkan dengan kultur politik lain? Bukankah para guru tarekat tersebut adalah elit agama yang riil memiliki kekuatan politik untuk melakukan tawar-menawar kekuasaan dengan elit birokrat? Tidak mudah menjawab pertanyaan ini. Alternatif jawabannya barangkali bisa ditelusuri dari strategi politik Orde Baru. Seperti telah banyak didiskusikan bahwa pemerintah Orde Baru dengan sukses mengembangkan sistim pemerintahan yang sentralistis, memonopoli sumber-sumber ekonomi dan politik, sehingga mampu melakukan tindakan-tindakan yang represif dan otoritarian. Karena itu menjadi mudah dipahami apabila posisi elit agama adalah marginal, mereka berada di pinggiran, dan tidak cukup kuat mempengaruhi proses pengambilan keputusan-keputusan politik di tingkat lokal.

32

Woshinsky, Oliver H., Culture and Politics, An Introduction to Mass and Elite Political Behavior, Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey, 1995, bal.65.

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa persepsi para guru tarekat tentang pejabat pemerintah lokal, serta intensitas hubungan mereka dengan pejabat pemerintah lokal, memiliki kaitan yang signif kan dengan dukungannya pada partai politik. Para guru tarekat kategori pertama pada umumnya adalah pendukung PPP. Bagi kalangan ini PPP adalah partai politik yang berasaskan Islam dan secara tegas berjuang dalam bingkai akidah dan syariat Islam. Responden yang kebetulan kader partai ini menyatakan bahwa komunitas tarekat tidak bisa dilepaskan dari tradisi pesantren dan Nahdiatul Ulama. Pesantren dan Nahdiatul Ulama inilah yang ketika terjadi fusi partai Islam menjadi pilar penting bagi PPP.

Sementara itu para guru tarekat kategori kedua pada umumnya mendukung Golkar. Bagi sebagian mereka dukungan terhadap partai politik tidak harus dikaitkan dengan perguruan tarekat. Kegiatan tarekat adalah bagian usaha dari makhluk Allah untuk membersihan hati dan sebuah laku spiritual dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, karena itu harus dipisahkan dengan masalah politik yang dalam kenyataannya lebih mementingkan pemenuhan kebutuhan duniawi. Kepentingan serta arah dua kegiatan tersebut berbeda dan harus dipisahkan. Seorang responden menyatakan usaha pemisahan semacam itu pernah dilakukan oleh Abu Hurairah. Ketika terjadi pergolakan perebutan kekuasaan antara Ali dan Mu'awiyah (yang kemudian dimenangkan Mu'awiyah), Abu Hurairah menyatakan bahwa sebagai berikut: "saya mengikuti Ali dalam hal agama, dan mengikuti Mu'awiyah dalam hal kenegaraan". Selanjutnya, menurut mereka, Golkar memang tidak berasaskan Islam, tetapi sebenarnya cukup serius ikut memikirkan berkembangnya syiar Islam di daerah ini.

Satu hal yang menarik dari hasil penelitian ini adalah hampir semua responden menyatakan bahwa ketika orang menjadi bagian dari komunitas tarekat seharusnya menjauhkan diri kegiatan politik praktis. Komunitas tarekat adalah jamiah yang mengutamakan masalah ilmu hakekat dan ma'rifat, sedangkan politik adalah termasuk wilayah syariah yang mengurus keduniwian. Kedua hal ini berbeda, dan seharusnya dipisahkan. Itulah sebabnya para guru tarekat tersebut tidak pernah merasa perlu memberikan penjelasan secara terbuka terhadap para murid mengenai hal-hal yang berkaitan dengan politik. Meskipun demikian, hampir semua responden menyatakan bahwa setiap menjelang Pemilu selalu ada murid yang bertanya tantang partai politik yang seharusnya didukungnya. Para guru tarekat pada umumnya

JSP • Vol. 2, No. 1, Juli 1998

menolak memberi petunjuk atau fatwa politik, terutama karena kegiatan tarekat tidak terkait dengan politik. Kalaupun kemudian harus memberi jawaban, keterangan yang mereka berikan biasanya bersifat umum. Meskipun demikian satu hal yang sulit dihindari adalah informasi di seputar dukungan politik para guru tarekat terhadap partai politik tertentu ternyata secara getoktular sampai juga kepada para mund. Bagi sebagian responden, dukungan para murid tarekat terhadap partai politik tertentu (baik Golkar dan PPP) tidak harus sama dengan pilihan guru tarekatnya. Hasil penelitian tersebut memperlihatkan betapa pemerintah Orde Baru telah sukses memasang strategi politik dengan memisahkan agama dan politik. Pemerintah Orde Baru kelihatannya cukup jeli melihat ketika agama erat terkait dengan politik, akan melahirkan gerakan politik dengan referensi agama yang dalam sejarah politik bangsa ini terbukti melahirkan kekuatan yang bisa merepotkan pusat kekuasaan.⁵

Murid Tarekat dan Politik

Uraian berikut diawali dengan pembahasan tentang pandangan para murid tarekat terhadap status dan peran umara. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa pandangan para murid dalam masalah tersebut tidak janh berbeda dengan pandangan guru. Tendensi demikian mudah dimengerti karena guru adalah figur panutan yang pandangannya ditempatkan sebagai acuan dalam melihat berbagai persoalan yang berkembang dalam masyarakat. Penelitian ini telah mewawancarai 50 orang murid tarekat, terdiri dari 29 murid tarekat Naqsyabandiyah-Kholidiyah dan 21 murid tarekat Qodiriyah wa Naqsyabandiyah.

Sebagian besar responden menyatakan bahwa tarekat adalah ilmu kasepuhan atau lebih cocok dengan orang yang sudah berusia tua. Pernyataan ini nampaknya berkaitan dengan kecenderungan bahwa murid tarekat kebanyakan berusia tua. Pada usia itu orang mulai lebih banyak memikirkan bekal menghadapi hidup akherat. Ketika kepada responden ditanyakan bagaimana pandangannya tentang umara, jawaban mereka kebanyakan

Soebardi, S., 'Islam di Indonesia' dalam Prisma, No. Ekstra, LP3ES, Jakarta, him. 65-80

Sunyoto Usman

menyatakan bahwa umara adalah pejabat pemerintah yang mau melibatkan secara aktif ulama dalam proses pembuatan kebijakan atau keputusan penting. Apabila umara dan ulama dapat bekerja sama, maka bukan mustahil sebuah negara yang aman, tenteram dan makmur, 'baldatun thoyibatun wa robun ghofuur', akan dapat diwujudkan.

Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa pandangan responden terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan masyarakat ternyata juga terbelah dua. Sebagian responden menyatakan bahwa apa yang dilakukan oleh aparat pemerintah lokal di daerah ini kurang sesuai dengan syariat yang dikehendaki oleh ajaran Islam. Mereka sadar bahwa sejumlah program pembangunan sudah direncanakan dan diimplementasikan dengan mempertimbangkan pelbagai kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Namun mereka melihat masih banyak langkah-langkah pemerintah lokal kurang menapak pada ketentuan syariat Islam. Mereka kecewa ketika pemerintah lokal masih memberi ijin peredaran minuman keras, lokalisasi pelacuran dan perjudian. Sementara itu, sebagian responden yang lain menyatakan bahwa memang benar yang dilakukan oleh aparat pemerintah di daerah ini belum sesuai dengan syariat yang dikehendaki oleh ajaran Islam. Tetapi secara umum sebenarnya sudah banyak menguntungkan umat Islam. Kemudian ketika mereka diminta menilai hubungan antara pejabat pemerintah lokal dan ulama di daerah, kebanyakan responden menyatakan bahwa hubungan tersebut cukup akrab. Hal ini antara lain ditunjukkan oleh: (1) pemerintah lokal telah memberi sumbangan finansial bagi sebagian kegiatan tarekat, (2) kunjungan pejabat pemerintah dalam kegiatan tarekat, dan (3) selalu ada kemudahan ijin bagi tarekat yang hendak melaksanakan kegiatan yang ingin menghadirkan banyak orang.

Selanjutnya ketika kepada responden ditanyakan partai politik apa yang mereka dukung pada Pemilu 1992 yang lalu, jawaban responden juga terbelah dua. Responden dari perguruan tarekat Qodiriyah wa Nagsyabandiyah yang berpusat di desa Piji sebagian memberi dukungan Golkar dan sebagian yang lain memberi dukungan PPP. Sedangkan murid perguruan tarekat Naqsyabandiyah-Kholidiyah, baik yang berpusat di desa Kwanaran maupun yang berpusat di Undaan, lebih mendukung PPP. Meskipun keterlibatan responden dalam partai politik pada umumnya terbatas hanya sebagai simpatisan (khususnya pada saat berlangsung pemilu saja) namun satu hal layak dicatat adalah pilihan partai politik mereka tidak selamanya harus

mengikuti pilihan guru. Seperti telah diungkapkan pada terdahulu bahwa guru tarekat Qodiriyah wa Naqsyabandiyah yang berpusat di desa Piji adalah pendukung atau simpatisan Golkar. Kecenderungan ini tidak nampak di kalangan murid, karena ternyata tidak sedikit di antara murid tarekat ini menjadi pendukung atau simpatisan PPP. Pertanyaan yang relevan diajukan adalah mengapa murid tarekat tersebut tidak seutuhnya patuh kepada gurunya dalam urusan politik? Mereka bisa memiliki pilihan sendiri yang berbeda dengan gurunya? Tendensi semacam itu nampaknya berakar dari ciri kepemimpinan yang sekarng disandang oleh para guru tarekat. Kepemimpinan guru tarekat kelihatannya tidak lagi bersifat polymorphic atau dalam banyak bidang, tetapi telah bergeser menjadi bersifat monomorphic atau dalam bidang tertentu saja (bidang keagamaan). Dalam bidang politik, pengikut tarekat mulai mencari referensi lain sesuai dengan perkembangan aspirasi politik masyarakat.

Ketika kepada mereka diminta menilai keberadaan partai-partai politik di daerahnya, sebagian responden menganggap bahwa Golkar adalah organisasi politik yang sulit dipisahkan dengan pemerintah yang berkuasa. Tokoh-tokoh Golkar kebanyakan adalah pejabat pemerintah, bahkan hampir semua adalah pejabat teras yang determinan dalam mengambil keputusan politik yang berkaitan dengan kepentingan publik. Pandangan demikian ternyata ikut mempengaruhi mereka ketika memberi dukungan partai politik. Bagi mereka, setiap muslim seyogyanya mendukung kemauan pemerintah, dan oleh karena itu seyogyanya juga memberi dukungan organisasi politiknya. Sementara itu, sebagian responden yang lain bertentangan dengan pandangan semacam itu. Kalangan ini melihat Golkar adalah organisasi politik dan keberadaannya berbeda dengan pemerintah. Pemerintah adalah lembaga yang mengatur hidup bermasyarakat, terutama dalam memberi pelayanan segala bentuk kebutuhan anggota masyarakat. Karena itu tidak ada kewajiban bagi seorang muslim memben dukungan Golkar. Bagi kalangan ini kedudukan Golkar adalah sama dengan PPP atau PDI. Bagi sebagian murid, meskipun PPP berasaskan Pancasila, namun partai ini tetap dianggap sebagai partai yang Islami dan yang paling potensial menyalurkan aspirasi umat Islam. Kendatipun begitu menurut mereka tidak ada lagi keharusan bagi warga Nahdlatul Ulama mendukung PPP. Mereka merasa tidak keberatan andaikata ada warga Nahdlatul Ulama yang menjadi simpatisan atau memberi dukungan Golkar atau bahkan mungkin PPP. Dukungan warga Nahdlatul Ulama terhadap PDI hampir tidak mungkin terjadi pada tahun 1970an, karena pada saat itu PDI masih identik dengan PNI.

Sebagaimana telah diungkapkan di depan bahwa tarekat diyakini oleh para pengikutnya sebagai paguyuban yang mampu mendekatkan diri ke jalan Allah. Dalam dunia tarekat memang terdapat pelbagai perbedaan ritual atau kegiatan, namun semua menuju pada satu harapan yaitu membersihkan hati dari godaan duniawi. Dalam kegiatan tarekat seperti pengajian, khalwat dan tawajuhan seringkali terjadi interaksi intensif antara guru dan murid maupun di antara murid. Karena itu kegiatan semacam itu dimungkinkan dipergunakan sebagai saluran menyampaikan berbagai informasi yang berkaitan dengan kebijaksanaan pemerintah, atau sebagai sarana mobilisasi massa bagi kepentingan politik. Sebagian murid tarekat menyatakan bahwa dalam kegiatan semacam itu boleh saja pemerintah menyampaikan informasi tentang kebijaksanaan pembangunan, selama tidak mengganggu ibadah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sejumlah responden pernah mendengar informasi tentang Keluarga Berencana dan kebersihan lingkungan.

Namun hampir sebagian besar mereka menolak ketika tarekat dipergunakan sebagai sarana memobilasi massa untuk kepentingan politik terutama yang terkait dengan pemilihan umum. Mereka menegaskan bahwa kegiatan tarekat seharusnya tidak dikaitkan dengan urusan politik. Perguruan tarekat seharusnya tidak boleh mengembangkan diskriminasi perlakuan terhadap murid berdasar afiliasi politiknya. Berpolitik adalah hak dan urusan pribadi, sehingga bisa saja seorang pengikut tarekat aktif atau bahkan menjadi kader PPP, Golkar, dan PDI.

Kesimpulan

Berikut disampaikan beberapa kesimpulan penting dari hasil penelitian ini. Pertama, di kalangan para guru tarekat terdapat perbedaan pandangan tentang keberadaan pemerintah sekarang. Sebagian menganggap agak jauh dari konsep umara karena itu perlu dikoreksi dan tidak harus ditaati, dan sebagian yang lain menganggap kurang lebih sama dengan dengan konsep umara karena itu perlu didukung. Penyimpangan-penyimpan yang terjadi adalah sebuah kelemahan dan ada kemungkinan bisa diperbaiki.

Kedua, meskipun para guru tarekat sama-sama beranggapan bahwa tarekat adalah kegiatan membersihkan diri, namun bukan berarti mereka lalu tidak peduli dengan kegiatan politik. Mereka memang tidak berkecimpung langsung

dalam kegiatan politik praktis, namu masih mengikuti perkembangan politik. Dalam hal ini mereka terbelah dua: sebagian memberi dukungan partai pemerintah, dan sebagian yang lain tidak. Di kalangan yang disebutkan terakhir ini kelihatannya masih tetap dilandasi pemikiran politik bahwa umat Islam harus berafiliasi dengan partai yang Islami.

Ketiga, fenomena taqlid di kalangan kelompok tarekat sangat diutamakan. Meskipun begitu dalam kaitannya dengan afiliasi politik terbelah dua pandangan. Sebagian menyatakan pilihan guru seharusnya diikuti oleh murid dan sebagian yang lain menyatakan pilihan guru tidak harus diikuti oleh murid. Kecenderungan demikian terjadi paling tidak berakar pada dua hal yaitu: (1) keberhasilan pemerintah Orde Baru memisahkan agama dan politik, dan (2) kepemimpinan guru tarekat yang semakin bersifat monomorphic atau hanya berkonsentrasi pada satu bidang yaitu bidang keagamaan.

Daftar Bacaan

- Abdurrahman, Moeslim, 'Kesyahduan Sufi dalam Transformasi Sosial, Suatu Pengamatan Perkembangan Tarekat' dalam *Pesantren*, No.3 Vol. II, Jakarta: P3M.
- Bruinessen, Martin van, *Tarekat Naqsyabandiyah di Indonesia*, Bandung: Mizan, 1992.
- Soebardi, S., 'Islam di Indonesia' dalam Prisma, nomor ekstra, jakarta: LP3ES.
- Wahid, Abdurrahman, *Muslim di Tengah Pergumulan*, Jakarta: Lembaga Penunjang Pembangunan Nasional.
- Woshinsky, Oliver H., Culture and Politics, An Introduction to Mass and Elite Political Behavior, New Jersey: Prentice Hall, Englewood Cliffs, , 1995.